

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Oleh

Daniel Bernard Simbolon

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di Provinsi Lampung, penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung menimbulkan persoalan fiskal karena kendaraan tersebut menggunakan infrastruktur daerah tanpa memberikan kontribusi pajak di wilayah operasionalnya (*tax loss potential*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung? dan (2) Bagaimana implikasi kebijakan pembayaran PKB dengan TNKB luar Lampung untuk meningkatkan PAD.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan metode analisis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak I Bidang PKB dan BBNKB, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, dan Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Negara Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Lampung serta wawancara dengan responden wajib pajak melalui formulir *online*. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian, serta buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung dilakukan melalui kebijakan fiskal dan administratif berupa pembebasan tunggakan pokok dan denda PKB dan pembebasan pajak progresif sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah Provinsi Lampung. (2) Kebijakan tersebut memberikan implikasi positif terhadap peningkatan PAD, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dengan TNKB luar Lampung yang melakukan pembayaran PKB sekitar 73%, yaitu dari 8.523 kendaraan pada tahun 2024 menjadi 14.761 kendaraan pada tahun 2025, sehingga meningkatkan potensi penerimaan pajak daerah di Provinsi Lampung, namun masih terdapat tantangan dan hambatan yang menyebabkan peningkatan PAD tersebut belum maksimal.

Kata Kunci: PKB, TNKB Luar Lampung, Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

KEBIJAKAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR LUAR LAMPUNG UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

By

Daniel Bernard Simbolon

Motor Vehicle Tax (PKB) is one of the main sources of Provincial Original Revenue (PAD) as regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, as well as Regional Regulation of Lampung Province Number 4 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies. In Lampung Province, the use of motor vehicles with out-of-region license plates (TNKB) creates fiscal problems, as these vehicles utilize regional infrastructure without contributing tax revenue in their operational area (tax loss potential). The problems addressed in this study are: (1) What policies are implemented by the regional government to reduce the use of motor vehicles with out-of-region license plates in Lampung? and (2) What are the implications of the motor vehicle tax payment policy for out-of-region license plates in increasing PAD?

This study employs a normative and empirical approach using qualitative analysis methods. Primary data were obtained through interviews with the Head of Sub-Division of Motor Vehicle Tax I (PKB and BBNKB), the Head of Sub-Division of Data and Information, and a Functional Officer for State Financial Analysis at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Lampung Province, as well as from taxpayer respondents through an online questionnaire. Secondary data were collected from laws and regulations, official documents, previous research, and relevant literature.

The results of the study indicate that: (1) The regional government's policy in reducing the use of motor vehicles with out-of-region license plates is carried out through fiscal and administrative measures, including motor vehicle tax amnesty programs, exemption of principal tax arrears and penalties, as well as exemption of progressive tax, as part of the regional government's authority in collecting regional taxes in Lampung Province. (2) These policies have a positive implication on increasing PAD, as indicated by a 73% increase in the number of out-of-region vehicles paying motor vehicle tax, from 8,523 vehicles in 2024 to 14,761 vehicles in 2025, thereby increasing the potential for regional tax revenue in Lampung Province. However, there remain various challenges and obstacles that prevent the increase in PAD from being fully optimized.

Keywords: Motor Vehicle Tax (PKB), TNKB Outside Lampung, Lampung Provincial Government Policy, Regional Own-Source Revenue (PAD).